

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR TAHUN 2011-2020**

***LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE
BOGOR CITY 2011-2020***

Rea Dwiardhya Garini¹, Dr. Ir. Faizal Maad, M.Si², Dr. Ir. James Sinurat, MURP³

^{1,2,3}Universitas Nusa Bangsa

Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 4, Tanah Sereal, Kota Bogor, Indonesia

¹rdgarini.rahendraputri@gmail.com

²fzmaad13@gmail.com

³jamesh.sinurat@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Financial Performance of the Regional Government of Bogor City in 2011-2020 in terms of financial ratios and the factors that affect the Financial Performance of the Regional Government of Bogor City in 2011-2020. This research is a type of quantitative descriptive research carried out in the ranks of the Bogor City Government, West Java Province. The data in this study are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of the City of Bogor. The data analysis method used is ratio analysis and descriptive analysis, multiple linear regression analysis, classical assumption test and hypothesis testing. The results of the financial performance analysis, in terms of the ratios: (1) Regional Financial Independence Ratio in the category of Medium regional ability, and Participatory relationship patterns. (2) Regional Financial Dependency Ratio with Very High category. (3) The Degree Ratio of Regional Financial Fiscal Decentralization in the Enoughcategory. (4) Effectiveness Ratio to Regional Original Revenue with Very Effective criteria. (5) Regional Financial Efficiency Ratio with Inefficient criteria. The results of the analysis in terms of the factors that affect the financial performance of the region. The Regional Original Income variable partially has a significant positive effect on the Financial Performance of the Regional Government of the City of Bogor. The Balancing Fund partially has a significant negative effect on the Financial Performance of the Regional Government of Bogor City. The variables of Local Original Income and Balanced Funds simultaneously have a significant effect on the Financial Performance of the Regional Government of Bogor City. (Times New Roman, 10Pts, Italic, Spacing: Single space)

Keywords: *Regional Financial Performance, Financial Ratios, APBD.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2020 ditinjau dari rasio keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2011-2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di jajaran Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio dan analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis. Hasil analisis kinerja keuangan, ditinjau dari rasio: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam kategori kemampuan daerah Sedang, dan pola hubungan Partisipatif. (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dengan kategori Sangat Tinggi. (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah dengan kategori Cukup. (4) Rasio Efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan kriteria Sangat Efektif. (5) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan kriteria Tidak Efisien. Hasil analisis ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Variabel Pendapatan Asli

Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, APBD.

1. PENDAHULUAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah guna mewujudkan otonomi daerah merupakan fenomena politik yang sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Berlandaskan kepada kedua Undang-Undang ini, salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penerapan analisis rasio keuangan terhadap APBD merupakan cara menganalisis dalam mengelola keuangan daerah. Agar dapat diketahui dengan cara melakukan pengkajian/analisis terhadap keuangan suatu daerah.

Kota Bogor yang terletak dekat dengan Ibu Kota Negara, Jakarta, adalah kota yang memiliki potensi cukup besar, untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakatnya baik dari segi anggaran, maupun asset dan sumber daya manusia, demikian pula penciptaan keterbukaan, pertanggungjawaban publik dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dari hasil studi pendahuluan yang diperoleh data mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2011-2020 sebagai mana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Gambaran APBD Kota Bogor T.A. 2011-2020
(dalam Miliar Rupiah)

T.A.	Keterangan			
	PD	PAD	DP	BD
1	2	3	4	5
2011	1,141.64	230.45	860.21	1,074.58
2012	1,375.30	300.93	1,014.91	1,111.78
2013	1,574.37	464.69	1,082.27	1,421.28
2014	1,757.86	544.99	1,188.40	1,702.11
2015	1,827.01	617.06	840.33	2,038.55
2016	2,135.47	711.73	1,146.50	2,512.41
2017	2,081.12	728.66	1,148.23	2,391.24
2018	2,261.05	875.23	1,083.55	2,530.75
2019	2,350.48	944.4	1,039.37	2,607.68
2020	2,434.34	1,083.41	1,054.62	2,604.49

Sumber: Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor T.A. 2011-2020 ditinjau dari segi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal

Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ? 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor?

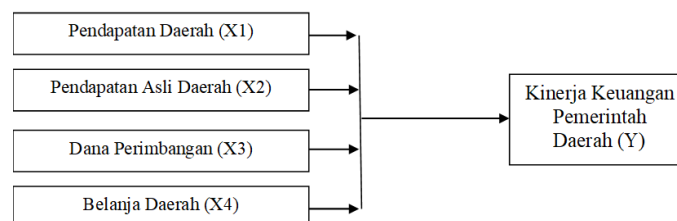
1.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor selama T.A. 2011-2020. 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor T.A. 2011-2020.

1.3. Rumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian data kerangka berpikir penelitian yang telah diuraikan di atas, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
2. Pendapatan Asli Daerah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
3. Dana Perimbangan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
4. Belanja Daerah (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
5. Pendapatan Daerah (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Perimbangan (X3), Belanja Daerah (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).



Sumber: Ringkasan APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Gambar 1. Kerangka Hubungan antar Variabel Penelitian

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di jajaran Pemerintahan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dari bulan September hingga bulan Oktober 2021.

2.2. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Bogor dilihat dari rasio : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3. Pengumpulan Data Penelitian

Data ini merupakan data sekunder, terdiri dari: data realisasi Pendapatan Daerah, data realisasi Pendapatan Asli Daerah, data realisasi Dana Perimbangan, data realisasi Belanja Daerah pada realisasi APBD T.A. 2011-2020. Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan-catatan keuangan yang ada pada instansi Pemerintah Kota Bogor yang diteliti selama Tahun 2011-2020.

2.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berupa rasio, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

2.5. Teknik Analisis Data

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor digunakan 5 rasio keuangan terdiri dari:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), diukur menggunakan formulasi :

$$RKKD = \frac{PAD}{DP} \times 100 \%$$

Sebagai pedoman pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Pedoman Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim (2007:232) Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba Empat

Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (RTKKD), diukur menggunakan formulasi :

$$\text{RTKKD} = \frac{\text{DP}}{\text{Total PD}} \times 100 \%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Departemen Dalam Negeri – Fisipol UGM, 1991

Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (RTDDFKD), diukur menggunakan formulasi :

$$\text{RTDDFKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PD}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel 4 berikut :

Tabel 4. Kriteria Penilaian Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Departemen Dalam Negeri – Fisipol UGM, 1991

Rasio Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (REPAD), diukur menggunakan formulasi :

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 5. Kriteria Penilaian Skala Interval Efektifitas terhadap PAD

Persentase (%)	Tingkat Efektifitas
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327, 1996

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), diukur menggunakan formulasi :

$$REKD = \frac{\text{Total Realisasi BD}}{\text{Total Realisasi PD}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Penilaian Skala Interval Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase (%)	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327, 1996

2.6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan metode analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan *software SPSS*. Sebelum dilakukan analisis regresi maka perlu Uji Asumsi Klasik, terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

2.7. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel independen terdiri dari: Pendapatan Daerah (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Perimbangan (X3), dan Belanja Daerah (X4) sedangkan sebagai variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dimana persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

2.8. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan analisis regresi linier berganda meliputi uji F, uji t, dan koefisien determinasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rasio Keuangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kinerja Keuangan Pemda Kota Bogor diukur dengan 5 indikator, dengan menggunakan data yang dimuat dalam laporan APBD Pemda Kota Bogor periode T.A. 2011-2020.

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tabel 7. Hasil Olah Data RKKD Kota Bogor T.A. 2011 – 2020

T.A.	PAD (Rp)	DP (Rp)	RKKD (%)	Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
2011	230.449.644.620	860.209.669.806	26,78	Rendah	Konsultatif
2012	300.932.470.210	1.014.910.114.083	29,65	Rendah	Konsultatif
2013	464.695.880.000	1.082.269.790.000	42,93	Rendah	Konsultatif
2014	544.996.250.000	1.188.391.600.000	45,85	Rendah	Konsultatif
2015	617.062.227.085	840.331.669.000	73,43	Sedang	Parsitipatif
2016	711.730.823.933	1.146.500.330.117	62,07	Sedang	Parsitipatif
2017	728.666.344.804	1.148.227.183.942	63,46	Sedang	Parsitipatif
2018	875.230.630.511	1.083.553.314.000	80,77	Tinggi	Delegatif
2019	944.394.650.807	1.039.371.277.000	90,86	Tinggi	Delegatif
2020	1.083.412.298.220	1.054.615.992.000	102,73	Tinggi	Delegatif
Rata - rata :			61,853	Sedang	Partisipatif

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Hasil Olah Data sebagaimana disajikan pada tabel 7, rata-rata persentase RKKD Pemerintah Kota Bogor adalah 61,853% yang termasuk dalam skala interval 50% - 75% dengan kategori Sedang, dan pola hubungan rata-rata Partisipatif.

b) Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (RTKGD)

Tabel 8. Hasil Olah Data RTKGD Kota Bogor Tahun 2011 - 2020

T.A.	DP (Rp)	PD (Rp)	Persentase	RTKGD
2011	860.209.669.806	1.141.638.163.971	75,34	Sangat tinggi
2012	1.014.910.114.083	1.375.300.603.178	73,79	Sangat tinggi
2013	1.082.269.790.000	1.574.372.010.000	68,74	Sangat tinggi
2014	1.188.391.600.000	1.757.857.930.000	67,60	Sangat tinggi
2015	840.331.669.000	1.827.008.273.928	45,99	Tinggi
2016	1.146.500.330.117	2.135.473.505.109	53,68	Sangat tinggi
2017	1.148.227.183.942	2.081.123.963.826	55,17	Sangat tinggi
2018	1.083.553.314.000	2.261.049.903.659	47,92	Tinggi
2019	1.039.371.277.000	2.350.478.728.324	44,21	Tinggi
2020	1.054.615.992.000	2.434.344.617.189	43,32	Tinggi
Rata - rata :			57,576	Sangat tinggi

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Hasil Olah Data sebagaimana disajikan pada tabel 8, rata-rata persentase RTKKD Pemerintah Kota Bogor sebesar 57,576% yang termasuk dalam skala interval $> 50,00\%$ dikategorikan Sangat Tinggi.

c) *Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (RTDDFKD)*

Tabel 9. Hasil Olah Data RTDDFKD Kota Bogor T.A. 2011 - 2020

T.A.	PAD (Rp)	PD (Rp)	Persentase (%)	RTDDFKD
2011	230.449.644.620	1.141.638.163.971	20,18	Sedang
2012	300.932.470.210	1.375.300.603.178	21,88	Sedang
2013	464.695.880.000	1.574.372.010.000	29,51	Sedang
2014	544.996.250.000	1.757.857.930.000	31,00	Cukup
2015	617.062.227.085	1.827.008.273.928	33,77	Cukup
2016	711.730.823.933	2.135.473.505.109	33,32	Cukup
2017	728.666.344.804	2.081.123.963.826	35,01	Cukup
2018	875.230.630.511	2.261.049.903.659	38,70	Cukup
2019	944.394.650.807	2.350.478.728.324	40,17	Baik
2020	1.083.412.298.220	2.434.344.617.189	44,50	Baik
Rata - rata :			32,804	Cukup

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Hasil Olah Data seperti disajikan pada tabel 9, rata-rata persentase RTDDFKD adalah 32,804% yang termasuk dalam skala interval 30,01% - 40,00% kemampuan keuangan daerah dikategorikan Cukup.

d) *Rasio Efektivitas terhadap PAD (REPAD)*

Tabel 10. Hasil Olah Data REPAD Kota Bogor T.A. 2011 - 2020

T.A.	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	230.449.644.620	181.953.035.493	126,65	Sangat Efektif
2012	300.932.470.210	211.014.043.190	142,61	Sangat Efektif
2013	464.695.880.000	315.010.039.863	147,51	Sangat Efektif
2014	544.996.250.000	413.249.212.694	131,88	Sangat Efektif
2015	617.062.227.085	627.815.080.243	98,28	Efektif
2016	711.730.823.933	728.030.823.933	97,76	Efektif
2017	728.666.344.804	917.788.606.450	79,39	Kurang Efektif
2018	875.230.630.511	887.396.041.682	98,62	Efektif
2019	944.394.650.807	972.607.288.978	97,09	Efektif
2020	1.083.412.298.220	741.531.123.201	146,10	Sangat Efektif
Rata - rata :			116,589	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Hasil Olah Data sebagaimana disajikan pada tabel 10, rata-rata REPAD adalah 116,589% yang termasuk dalam skala interval diatas 100% dengan kriteria Sangat Efektif.

e) *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)*

Tabel 11. Hasil Olah Data REKD Kota Bogor T.A. 2011 - 2020

T.A.	BD (Rp)	PD (Rp)	Persentase (%)	REKD
2011	1.074.576.515.295	1.141.638.163.971	94,12	Kurang Efisien
2012	1.111.776.515.295	1.375.300.603.178	80,83	Cukup Efisien
2013	1.421.277.450.000	1.574.372.010.000	90,27	Kurang Efisien
2014	1.702.110.250.000	1.757.857.930.000	96,82	Kurang Efisien
2015	2.038.547.529.029	1.827.008.273.928	111,57	Tidak Efisien
2016	2.512.412.570.542	2.135.473.505.109	117,65	Tidak Efisien
2017	2.391.239.963.826	2.081.123.963.826	114,90	Tidak Efisien
2018	2.530.748.633.994	2.261.049.903.659	111,92	Tidak Efisien
2019	2.607.679.400.305	2.350.478.728.324	110,94	Tidak Efisien
2020	2.604.493.955.763	2.434.344.617.189	106,98	Tidak Efisien
Rata - rata :			103,6	Tidak Efisien

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Keterangan :

KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

T.A. = Tahun Anggaran

PD = Pendapatan Daerah

DP = Dana Perimbangan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Belanja Daerah

Hasil Olah Data seperti disajikan pada tabel 11, Rata-rata REKD Pemerintah Kota Bogor adalah 103,6% yang termasuk dalam skala interval 100% ke atas dengan kriteria Tidak Efisien.

3.2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor T.A. 2011-2020

a) Hasil Uji Normalitas

Tabel 12. Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.45799047
Most Extreme Differences	Absolute	.174
	Positive	.171
	Negative	-.174
Test Statistic		.174
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji normalitas membuktikan nilai *asympt.sig* pada uji *Kolmogorov-Smirnov* akan seluruh nilai residu data di atas tingkat signifikansi penelitian 5% yaitu sebesar 0,200 (20%). Hal ini memperlihatkan data digunakan berdistribusi normal.

b) Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 13. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD (X2)	1.000	1.000
2 (Constant)		
PAD (X2)	.815	1.227
DP (X3)	.815	1.227

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji multikolineritas membuktikan nilai *tolerance* untuk satu variabel dalam model regresi > 0,1 dan nilai VIF untuk satu variabel terhadap setiap model regresi < 10. Hasil uji ini memperlihatkan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c) Hasil Uji Autokorelasi

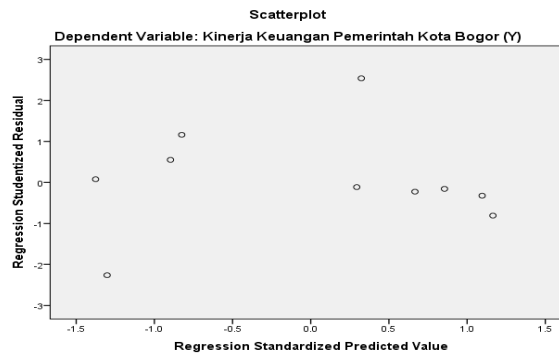
Tabel 14. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.968 ^a	.938	.930	6.71817	
2	.995 ^b	.991	.988	2.78710	1.062

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan pengujian autokorelasi nilai DW yaitu sebesar 1.062. Sehingga disimpulkan residual dari regresi bersifat independen atau tidak terjadi gejala autokorelasi, sebab nilai DW test yang dihasilkan pada rentang +/- 2.

d) Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olah Data

Gambar 2. Grafik Scatterplot

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas terlihat bahwa dari Grafik Scatterplot membuktikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.3. Uji Hipotesis: Pengaruh Variabel Independen (Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah) Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

Berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian estimasi hubungan antara keempat variabel independen (Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam persamaan regresi berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Tabel 15. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.546	5.751		.964	.363
PAD (X2)	8.724E-11	.000	.968	10.989	.000
2 (Constant)	57.378	8.587		6.682	.000
PAD (X2)	9.710E-11	.000	1.078	26.616	.000
DP (X3)	-5.629E-11	.000	-.254	-6.283	.000

Sumber: Hasil Olah Data

a) Uji F Statistik

Tabel 16. Uji F Statistik

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5450.256	1	5450.256	120.758	.000 ^b
Residual	361.070	8	45.134		
Total	5811.325	9			
2 Regression	5756.950	2	2878.475	370.559	.000 ^c
Residual	54.375	7	7.768		
Total	5811.325	9			

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Dana Perimbangan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Y).

b) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 17. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968 ^a	.938	.930	6.71817
2	.995 ^b	.991	.988	2.78710

Sumber: Hasil Olah Data

Dari hasil *output SPSS* tersebut nilai dari R^2 sebesar 0,991 berarti besar sumbangan pengaruh variabel independen yaitu 99.1%, sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan ini layak karena variabel independen yang digunakan memiliki nilai R^2 yang tinggi yaitu 99,1% mampu menjelaskan variabel dependen.

Dari hasil rekapitulasi analisis regresi linier berganda, uji F dan uji koefisien determinan, maka model hubungan antara ke dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Dana Perimbangan (X3) dapat digambarkan melalui persamaan berikut:

$$Y = 57,378 + 9,710X_2 - 5,629X_3 + \varepsilon, R^2 = 0,991$$

Koefisien regresi masing-masing variabel independen dapat dijelaskan :

1. Konstanta (α) = 57,378. Menunjukkan jika setiap variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sama dengan nol, maka nilai dari variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 57,378. Artinya, apabila tidak ada variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maka besarnya mencapai 57,378 %.

2. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,710 menunjukkan bahwa hubungan variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah positif, artinya bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah 1 rupiah menyebabkan kenaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebesar 9,710%.
3. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan sebesar -5,629 menunjukkan bahwa hubungan variabel Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah negatif, artinya bahwa kenaikan Dana Perimbangan 1 rupiah menyebabkan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebesar 5,629%.

c) *Hasil Uji Hipotesis:*

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Hasil pengujian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil t sebesar 26,616, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05 ($0,000 < 0,05$).
2. Pengaruh Dana Perimbangan (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Hasil pengujian membuktikan bahwa Dana Perimbangan menunjukkan hasil t sebesar -6,283, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2011-2020. Nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$).
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X2) dan Dana Perimbangan (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Hasil pengujian statistik secara simultan dapat diketahui bahwa nilai F dengan signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang berarti secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor T.A. 2011-2020.

3.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor ditinjau dari segi rasio

a) *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)*

Rata-rata persentase RKKD Pemerintah Kota Bogor selama T.A. 2011-2020 adalah 61,853% yang termasuk dalam skala interval 50% - 75% dengan kategori Sedang, dan pola hubungan rata-rata Partisipatif. Kemauan, dan inisiatif, serta ide/gagasan dari semua potensi yang ada pada Pemerintah Kota Bogor guna peningkatan PAD, untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan maupun menjalankan roda pemerintahannya, perlu usaha nyata dan sungguh-sungguh dibawah komando pimpinan daerah.

b) *Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (RTKKD)*

Rata-rata persentase RTKKD Pemerintah Kota Bogor T.A. 2011-2020 sebesar 57,576% yang termasuk dalam skala interval $> 50,00\%$ dikategorikan RTKKD Sangat Tinggi. Peningkatan PAD melalui kebijakan pajak dan reribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan tindakan secara komprehensif sehingga tidak lagi tergantung kepada pajak

daerah dan retribusi daerah saja, dengan mengidentifikasi perusahaan milik daerah dan investasi daerah, dalam upaya pengembangan yang bersinergi, massif, dengan *stakeholder* terkait, perbaikan/penyempurnaan, penyederhanaan prosedur dan mekanisme, agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber-sumber PAD. Selain itu perlu sosialisasi akan pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga memiliki andil dalam membiayai pembangunan.

c) *Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (RTDDFKD)*

Rata-rata persentase RTDDFKD T.A. 2011-2020 adalah 32,804% yang termasuk dalam skala interval 30,01% - 40,00% kemampuan keuangan daerah dikategorikan Cukup. Pemerintah Kota Bogor selama sepuluh tahun terakhir telah cukup mendapatkan tanggungjawab dan kewenangan untuk melakukan pembangunan. Pemerintah Kota Bogor di dalam mengelola PAD sudah cukup memiliki kemampuan, namun jika dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Bogor dalam upaya meningkatkan PAD dengan melakukan diversifikasi sumber-sumber PAD.

d) *Rasio Efektivitas terhadap PAD (REPAD)*

Rata-rata REPAD Pemerintah Kota Bogor sebesar 116,589% yang termasuk dalam skala interval diatas 100% dengan kriteria Sangat Efektif. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah sangat efektif, tingkat efektivitasnya memiliki prestasi yang baik.

e) *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)*

Rata-rata REKD Pemerintah Kota Bogor T.A. 2011-2020 adalah 103,6% yang termasuk dalam skala interval 100% ke atas dengan kriteria Tidak Efisien. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor harus mampu mengendalikan dan diharapkan dapat meminimalisir Belanja Daerah, agar sebanding/seimbang dengan Pendapatan Daerah. Guna dimasa mendatang mampu mencapai peningkatan efisiensi Belanja Daerah.

3.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

a) *Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor*

Hasil pengujian ini membuktikan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

b) *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor*

Hasil pengujian membuktikan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

c) *Pengaruh PAD dan DP terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor*

Hasil pengujian membuktikan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

4. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor T.A. 2011-2020 berdasarkan rasio: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah nilai rata-rata dengan kriteria Sedang, dan pola hubungan rata-rata Partisipatif. (2) Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah nilai rata-rata dengan kriteria Sangat Tinggi. (3) Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah dengan kategori Cukup. (4) Rasio Efektivitas terhadap PAD nilai rata-rata dengan kriteria Sangat Efektif. (5) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah nilai rata-rata dengan kategori Tidak Efisien.
2. Variabel PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Variabel PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

b) Saran

1. Bagi Peneliti berikutnya, dapat menggunakan alat pengukur lainya seperti rasio pertumbuhan (*growth ratio*), rasio keserasian, rasio aktivitas, rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*), dan rasio lainnya sebagai alat analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Kemauan, dan inisiatif, serta ide/gagasan dari semua potensi yang ada pada Pemerintah Kota Bogor guna peningkatan PAD, untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan maupun menjalankan roda pemerintahannya, perlu usaha nyata dan sungguh-sungguh dibawah komando pimpinan daerah.
3. Peningkatan PAD melalui kebijakan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan tindakan secara komprehensif sehingga tidak lagi tergantung kepada pajak daerah dan retribusi daerah saja, dengan mengidentifikasi perusahaan milik daerah dan investasi daerah, dalam upaya pengembangan yang bersinergi, massif, dengan *stakeholder* terkait, perbaikan/penyempurnaan, penyederhanaan prosedur dan mekanisme, agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber-sumber PAD. Selain itu perlu sosialisasi akan pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga memiliki andil dalam membiayai pembangunan.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah sangat efektif, tingkat efektivitasnya memiliki prestasi yang baik, serta harus mampu mengendalikan dan diharapkan dapat meminimalisir Belanja Daerah, agar sebanding/seimbang dengan Pendapatan Daerah. Guna dimasa mendatang mampu mencapai peningkatan efisiensi

Belanja Daerah. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Bogor dalam upaya meningkatkan PAD dengan melakukan diversifikasi sumber-sumber PAD, misalnya menggairahkan kembali Pariwisata Kota Bogor yang selama ini stagnan, berdasarkan kearifan lokal pendirian Koperasi, unit Keuangan pedesaan/kelurahan berbasis UMKM, dan pendirian BUMD sektor potensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Litbang Depdagri RI dan Fisipol – UGM.1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Departemen Dalam Negeri. 1996. *Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996*